

Jokowi (Bukan) Petugas Partai

Oleh: Hendra Kurniawan



JAGAT politik Tanah Air akhir-akhir ini semakin riuh. Perseteruan antara KPK dengan Polri tampak semakin tidak beretika. Dengan gamblang kedua institusi ini terus saling serang, cocok sana cocok sini, dan bukan tidak mungkin mengarah pada upaya kriminalisasi satu sama lain. Sangat miris rasanya menyaksikan dua lembaga penegak hukum yang semestinya saling topang kini justru sikut-sikutan.

Selama ini sudah banyak pengamat memberi solusi agar Komjen Budi Gunawan lebih baik *legawa* untuk mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri. Pemerintah akhirnya merespon masukan tersebut. Selasa (3/2/2015) kemarin, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyarankan agar Komjen Budi Gunawan berinisiatif mundur. Dengan mundurnya Komjen Budi Gunawan maka dilema politik dan hukum sekarang ini dapat segera diakhiri. Suara masyarakat yang tidak menginginkan Komjen Budi Gunawan dilantik begitu kuat dan tentu tak dapat dibungkam.

Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat rakyat harus segera bertindak tegas. Tak perlu berlama-lama dengan terus mencari saran dari sana-sini. Sudah terlalu banyak pihak yang dimintai masukan, kini saatnya menentukan. Tim Sembilan yang dibentuk oleh Pre-

siden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga telah mengantongi banyak temuan yang siap dipaparkan guna meyakinkan Presiden dalam mengambil keputusan. Tim Sembilan telah merekomendasikan agar Presiden segera mengumumkan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Dengan demikian, sebenarnya arah penyelesaian masalah ini sudah makin terang. Rakyat kini tinggal menanti pembuktian sikap dari Joko Widodo yang telah didaulat sebagai pemimpin rakyat. Jangan sampai Joko Widodo sebagai Presiden justru tersandera predikat petugas partai. Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden, Joko Widodo telah menegaskan bahwa dirinya hanya tunduk pada rakyat dan konstitusi. Sayangnya PDIP sebagai partai pengusung tidak dapat menerima sikap kenegarawanan Joko Widodo ini. Dalam pusaran konflik KPK vs Polri sekarang ini, semakin jelas bahwa PDIP tidak ingin Joko Widodo menanggalkan predikat petugas partai yang telah menyandernanya.

Posisi Presiden Joko Widodo memang dalam dilema, realitas politik

menunjukkan bahwa Komjen Budi Gunawan lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR, namun di sisi lain juga berstatus sebagai tersangka. Parahnya lagi kini kerap terdengar ancaman pemakzulan terhadap diri Joko Widodo apabila tidak melantik Komjen Budi Gunawan. Tentu sangat tidak rasional jika ada seorang Presiden digulingkan akibat tidak melantik seorang tersangka menjadi Kapolri.

Argumentasi pemakzulan semacam ini sangat melenceng dari akal sehat. Justru *impeachment* dapat terjadi apabila Presiden Joko Widodo bersikukuh melantik seorang tersangka menjadi pejabat publik. Tentu semakin ironis apabila ada sebuah intitusi penegak hukum dipimpin oleh seseorang yang berstatus tersangka kasus korupsi. Bagaimanapun akan sia-sia pekerjaan membersihkan lantai yang kotor dengan menggunakan sapu yang kotor pula. Salah-salah yang kotor akan semakin tambah tak keruan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) telah mengantongi beberapa nama calon kuat Kapolri baru. Kopolnas saat ini masih menunggu sikap resmi Presiden Joko

Widodo soal status Komjen Budi Gunawan. Ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden untuk mengumumkan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Setelah itu, Presiden dapat segera memilih calon Kapolri baru dan memediasi upaya rekonsiliasi antara KPK dengan Polri demi tekad bersama dalam memberantas korupsi. Di sinilah komitmen Presiden Joko Widodo benar-benar diuji.

Rakyat masih yakin bahwa dalam hati nuraninya yang terdalam, Joko Widodo tidak akan tega, mengadaikan amanat rakyat dengan lebih memilih menjadi petugas partai. Dia memiliki wewenang penuh sebagai pemimpin bangsa ini dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk partai pengusung.

Ada baiknya semua pihak dapat belajar dari Winston Churchill yang memegang teguh prinsip bahwa ketika pengabdian kepada negara dimulai, maka berakhirilah pengabdian kepada partai. Joko Widodo harus berani menegaskan bahwa dirinya bukan lagi petugas partai, tapi Presiden Republik Indonesia yang mendapat mandat penuh dari rakyat! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.